

waktu pembelajaran pesantren disesuaikan dengan waktu pembelajaran di sekolah formal.⁶³

c) Tipe pesantren berdasarkan jumlah santrinya.

Pondok pesantren dilihat dari jumlah santrinya merupakan jenis pondok pesantren yang menggambarkan termasuk pondok pesantren besar, pondok pesantren menengah, dan pondok pesantren kecil. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Dhofier bahwa pesantren dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri lebih besar dari 2000 orang termasuk pondok pesantren besar. Contoh dari pondok pesantren ini adalah Lirboyo, dan Ploso di Kediri, Gontor Ponorogo, Tebuireng, Denanyar Jombang, As-Syafi'iyah Jakarta dan sebagainya. Pondok jenis ini biasanya berskala nasional. Bahkan pondok modern Gontor Ponorogo mempunyai santri yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.
- 2) Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri antara 1000 sampai 2000 orang termasuk pondok pesantren menengah. Contoh dari pondok pesantren ini adalah Maslakul Huda Kajen-Pati. Pondok pesantren ini biasanya berskala regional.
- 3) Pondok pesantren yang memiliki santri kurang dari 1000 orang termasuk pesantren kecil. Contoh pondok pesantren jenis ini adalah Tegalsari (Salatiga), Kencong dan Jampes di Kediri. Pondok pesantren ini biasanya berskala lokal pondok, bahkan ada juga yang regional.⁶⁴

d) Tipe pesantren berdasarkan bidang pengetahuannya.

⁶³ Endin Mujahidin, *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama di Luar Sekolah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 19-20.

⁶⁴ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 42.

Pondok pesantren dilihat dari bidang pengetahuan merupakan jenis pondok pesantren yang menggambarkan kajian pengetahuan yang ada pada pesantren tersebut dibagi menjadi tiga jenis. Ketiga jenis pesantren tersebut adalah:

- 1) Pondok pesantren tasawuf: jenis pesantren ini pada umumnya mengajarkan pada santrinya untuk selalu menghambakan diri kepada Allah sang pencipta, dan banyak bermunajat kepada-Nya. Contoh pondok PETA Tulungagung, Pondok Bambu Runcing Parakan.
- 2) Pondok pesantren Fiqh: jenis pesantren ini pada umumnya lebih menekankan kepada santri untuk menguasai ilmu fiqih atau hukum Islam, sehingga diharapkan santri lulusannya dapat menyelesaikan permasalahan hidup berdasarkan hukum Islam. Contoh Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya, dan Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya.
- 3) Pondok pesantren alat: jenis pesantren ini pada umumnya lebih mengutamakan pengajaran tentang gramatika bahasa Arab dan pengetahuan filologis dan etimologis, dengan pelajaran utama *Nahwu* dan *Syorof*.⁶⁵

6. Materi Pembelajaran Pondok Pesantren

Secara umum, klasifikasi materi pelajaran di pesantren diklasifikasikan, yaitu tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, hadits, tasawuf, nahwu/saraf, dan akhlak. Kedelapan materi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Taudid, yaitu ilmu yang mempelajari keesaan Allah SWT dalam sifat, dzat, dan perbuatan-Nya. Kitab yang dijadikan

⁶⁵ E.S. Nadj, *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari bawah*. (Rahardjo, ed). (Jakarta: P3M, 1985), 53.

rujukan adalah Tijan Ad-darari, Aqidah Al-awwam, Kifayah Al-awwam, Matn As-sanusiyah, Al-adnan, Kitab As-sa'adah, Matn As-sanusiyah, Ushuluddin, Ad-din, Al-Islam, dan lain-lain.

- b) Fikih, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum mengenai berbagai perbuatan, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Kitab yang dijadikan rujukan adalah Fathul Wahhab, Minhaj Al-Abidin, Minhaj Al-Qawwim, Kifayat Al-Akhyar, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Bidayatul Mujtahid, Mizan Kubra, dan lain-lain.
- c) Ushul Fikih, yaitu ilmu yang mempelajari metode istinbath hukum para ulama. Kitab yang dijadikan rujukan antara lain: Al-Waraqat, Jam'ul Jawami', Al-Bayan, Ghayat Al-Ushul, dan lain-lain.
- d) Tafsir, ilmu yang mempelajari teks-teks Al-Qur'an, baik dilihat dari sudut bahasa, makna, asbab nuzul dan yang lainnya. Kitab yang dijadikan rujukan adalah Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ali Ash-Shabuni, Tafsir Al-Munir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Ibriz, Durut At-Tafsir, Tafsir Al-Madrasi, dan lain-lain.
- e) Hadits (riwayat dan dirayat), yaitu ilmu yang mempelajari ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kitab yang dijadikan rujukan adalah Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Bulughul Maraam, Riyadush Sholihin, Jawahir Al-Bukhari, dan lain-lain.
- f) Tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kitab yang dijadikan rujukan antara lain: Durratun Nashihin, Ihya Ulumuddin, Tanbihul Ghafilin, dan lain-lain.
- g) Nahwu dan Sharaf, yaitu ilmu yang mempelajari struktur bahasa Arab. Kitab yang dijadikan rujukan antara lain Mutammimah, Ibnu Aqil, Kaelani Izz, dan lain-lain.

- h) Akhlak, yaitu ilmu yang mempelajari baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam hidup sehari-harinya. Kitab yang dijadikan rujukan antara lain Ta'lim Al-Muta'allim, Uqud Al-Lujain, At-Tarbiyah wa At-Ta;lim dan lain-lain.

C. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan di atas mengenai perbedaan dan perbandingan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendidikan formal merupakan salah satu jalur pendidikan nasional sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat pengelolaan pendidikan, standar minimal, serta peraturan lainnya diatur langsung oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Pendidikan pesantren merupakan salah satu dari jenis pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pesantren merupakan ciri khas pendidikan keagamaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, dimana dalam pengelolaan, penyelenggaraan, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing pesantren, dengan tidak mengabaikan hak-hak pendidikan yang telah diberikan di dalam sistem pendidikan nasional.
3. Perbedaan yang mencolok pada perbandingan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren adalah terletak pada proses penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran yang berlangsung pada kedua jenis pendidikan ini. Namun keduanya merupakan sistem pendidikan yang saling mengisi satu sama lain dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Imron. 1992. *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)*. Tesis tidak dipublikasikan, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM)).
- Arifin. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.
- Asrohah, Hanun. 2000. *Pelembagaan Pesantren, Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. Disertasi UIN Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Az-Zarnuji. tt, *Tarjamah Ta'lim Muta'allim*, (Noor Aufa Shiddiq, terj). Surabaya : Al-Hidayah.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2000. *Sejarah Pesantren dari Walisanga hingga Kini*. Jurnal Yustisia, edisi 18, VII.
- Mujahidin, Endin. 2005. *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama di Luar Sekolah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi II. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nadj, E.S. 1985. *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari bawah*. (Rahardjo, ed). Jakarta: P3M.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Raharjo, M. Dawam (ed.) 1980. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Roqib. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta : Lkis.

Saridjo, M. 1980. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.

Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara.

Shihab, Alwi. 2002. *Islam Inklusif*. Cet. I; Bandung: Mizan.

Shodiq, M. 2011. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jurnal Falasifa Vol. No. 2. September 2011. Jember: STAIFAS-Press.

Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: KP3ES.

Sukamto, 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Sunyoto, A. 1990. *Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi Kasus*. Tesis tidak dipublikasikan. Malang: FPS IKIP.

Syukur, Fatah. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2003. *Pola Pembelajaran di Pesantren*. Jakarta: Depag RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN

Bahru Rozi
rozibahru38@gmail.com

***Abstrak :** Dunia pendidikan nasional saat ini banyak mengalami masalah. Masalah-masalah tersebut diantaranya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah. Pergantian menteri, maka akan berganti juga kebijakan. Kebijakan kadang juga dipengaruhi oleh kepentingan penguasa akan hal pendidikan. Akibatnya, output pendidikan kita menjadi terabaikan. Pengangguran, kenakalan remaja, penggunaan narkoba dan sejenisnya, adalah akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan yang salah. Masyarakat menjadi cemas, dan tingkat kepercayaan terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia semakin rendah. Menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, akademisi, masyarakat, dan orangtua. Untuk mengatasi problematika pendidikan nasional dibutuhkan solusi yang tepat dan bijak, disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.*

***Kata Kunci:** Menumbuhkan, Masyarakat, Pendidikan*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana manusia untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan apa yang telah cita-citakan sejak lama. Dengan berbekal pendidikan yang telah diperoleh, sangatlah wajar apabila manusia ingin mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Terlepas impian tersebut mudah atau sebaliknya sulit untuk diwujudkan.

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan.⁶⁶

Namun, realita yang ada di tengah masyarakat sangatlah berbeda. Pendidikan yang diharapkan bisa memenuhi segala kebutuhan dan cita-citanya, justru menjadi persoalan tersendiri. Pekerjaan yang telah lama diimpikan, seketika

⁶⁶ Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Konsep Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, 2010), Cet. II, hlm. 1

itu menjadi terkubur karena ditolak oleh perusahaan yang diidam-idamkannya sejak lama dikarenakan kalah bersaing dengan pelamar kerja lainnya. Akibatnya, banyak lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi yang menganggur karena tingginya tingkat persaingan pencari kerja dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini adalah secuil persoalan dari beberapa persoalan yang ada di negara kita. Adakah yang salah dalam dunia pendidikan kita atau memang hal seperti itu kerap terjadi di hampir semua negara, bukan hanya di negara kita saja. Masalah sebesar ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun praktisi pendidikan saja, namun menjadi tanggungjawab kita bersama, segenap lapisan masyarakat dan warga negara.

Implikasi dari persoalan tersebut diatas adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia pendidikan, baik terhadap pemerintah, guru, akademisi ataupun instansi-instansi yang terkait. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan proses dan waktu yang lama serta solusi-solusi yang tepat dan bijak untuk mengatasi problematika yang tengah terjadi di tengah masyarakat kita.

Sebelum membahas problematika pendidikan diatas beserta solusi-solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, maka kita harus mengerti dan memahami terlebih dahulu pengertian pendidikan dan tujuannya menurut para ahli beserta undang-undang yang menaunginya, tata cara penyelenggaraannya serta pelbagai problematika empiris yang ditemukan di lapangan.

B. Pengertian Pendidikan dan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Penyelenggaraannya

1. Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

Dalam bahasa Inggris istilah pendidikan dipergunakan dengan perkataan "*education*", biasanya istilah tersebut dihubungkan dengan pendidikan di sekolah, dengan alasan bahwa di sekolah tempatnya anak dididik oleh para ahli yang khusus mengalami pendidikan dan latihan sebagai profesi. Kata *education*

berhubungan dengan kata latin “*educere*”, yang berarti “mengeluarkan sesuatu kemampuan” (*e* = keluar, *ducere* = memimpin). Jadi berarti membimbing untuk mengeluarkan suatu kemampuan yang tersimpan dalam diri anak. Kata “*educere*” kita temukan dalam kata konduktor, yaitu seseorang yang memimpin sekelompok pemain musik, juga seseorang yang “memimpin kereta api dalam perjalanan (konduktor)”. Dalam ilmu listrik, konduktor ialah bahan (biasanya logam) yang dapat “membawa” aliran listrik.

Dalam bahasa Belanda kita temukan untuk pendidikan kata “*opvoeden*” (*op* = ke atas, *voeden* = memberi makan). Disini memberi makan termasuk dalam bahasa kiasan, yaitu memberi makanan rohani untuk meningkatkan kecakapan dan derajat seorang anak.⁶⁷

Menurut Langeveld, pengertian pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Sedangkan Ahmadi dan Uhbiyati mengemukakan beberapa definisi pendidikan sebagai berikut:

- a) Menurut Hoogeveld, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri.
- b) Menurut S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani.
- c) Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Menurut Drijarkara sebagaimana dikutip Ahmadi dan Uhbiyati:, bahwa:

- a) Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal ayah-ibu-anak, dimana terjadi pematangan anak. Dia berproses untuk akhirnya bisa membudaya sendiri sebagai manusia purnawan (dewasa).
- b) Pendidikan secara prinsip adalah berlangsung di lingkungan keluarga.

⁶⁷Modul Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, Pedagogik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), Cet. I, hlm. 3

- c) Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk membantu memanusaiakan, meembudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anaknya.

Menurut Henderson, pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan inteligen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya⁶⁸

2. Pengertian Pendidikan Menurut Undang-Undang

Dalam GBHN Tahun 1973 dikemukakan pengertian pendidikan, bahwa: “Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup”.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan tersencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian-pengertian pendidikan diatas, baik oleh para ahli pendidikan maupun pendidikan menurut undang-undang serta GBHN dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah, bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung bersama semua manusia: tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan

⁶⁸*Ibid*, hlm.3-4

tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli segalanya. Bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan manusia memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, yang disebut manusia seutuhnya.⁶⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pada Bab IV Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan tentang Standart Nasional Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan bakat, minat dan psikologi peserta didik.

Dari peraturan pemerintah tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik, harusnya memberdayakan dan menggali bakat, minat, dan potensi peserta didik. Dalam proses belajar mengajar tidak berpusat pada guru lagi (*teacher centris*), melainkan berpusat pada murid sebagai subyek belajar (*student centris*). Berbagai metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar harus dikuasai oleh seorang guru atau pendidik menurut kebutuhan dan keadaan peserta didik. Guru tidak dapat memaksakan satu metode saja, dikarenakan kemampuan peserta didik dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan adalah berbeda-beda.⁷⁰

3. Tujuan Pendidikan

Ada tiga alasan mengapa tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dirumuskan:

- 1) Jika sesuatu pekerjaan atau tugas tidak disertai tujuan yang jelas dan benar, maka akan sulitlah untuk memilih atau merencanakan bahan dan strategi yang hendak ditempuh atau dicapai.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 5-6

⁷⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Op. cit. hlm. 22

- 2) Rumusan tujuan yang baik dan terinci akan mempermudah pengawasan dan penilaian hasil belajar sesuai dengan harapan yang dikehendaki dari subjek belajar.
- 3) Perumusan tujuan yang benar akan memberikan pedoman bagi siswa/subjek belajar dalam menyelesaikan materi dan kegiatan belajarnya.

Jadi rumusan tujuan senantiasa merupakan suatu alat yang sangat bermanfaat dalam perencanaan, implementasi, dan penilaian suatu program belajar-mengajar.⁷¹

Tujuan pendidikan merupakan gambaran gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Membicarakan tujuan pendidikan, maka secara tidak langsung juga membicarakan tentang sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar (*fundamental*), sebab dari tujuan pendidikan tersebut kita akan dapat mengetahui ke arah mana anak didik akan dibawa.

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa tersebut. Indek Pembangunan Manusia (IPM) ditentukan oleh tiga hal, yaitu: kemampuan daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pendidikan yang dimiliki masyarakat. Jadi sangatlah jelas bahwa pendidikan masyarakat sangat menentukan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam pergaulannya antar bangsa saat ini.

Menurut Hummel (1997), bahwa ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan pendidikan:

- a. **Autonomy.** *Gives individuals and groups the maximum awareness, knowledge and ability so that can manage their personal and collective life to the greatest possible extent.*
- b. **Equity.** *Enable all citizens to participate in cultural and economic life by offering them an equal basic education.*

⁷¹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2010) hlm. 58

- c. *Survival. Permit every nation to transmit and enrich its cultural heritage over the generations, but also guide education towards mutual understanding and towards what has become a worldwide realization of common destiny.*

Tujuan pendidikan harus mengandung ketiga nilai. *Pertama, autonomy*, yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri, dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. *Kedua, equity* (keadilan), berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. *Ketiga, survival*, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.⁷²

Berdasarkan ketiga nilai tersebut di atas, pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, manusia-manusia yang berkebudayaan. Manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik, diharapkan dengan adanya tujuan pendidikan tersebut tercipta pula kehidupan yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan sebagai berikut:

*“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*⁷³

Menurut Undang-Undang tersebut di atas, tujuan pendidikan adalah sangat luas, menyangkut taraf hidup manusia yang ingin dicapai oleh masyarakat, atau suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

C. Problematika Pendidikan di Indonesia

⁷²Modul Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, *Pedagogik*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), Cet. I, hlm. 92

⁷³ *Ibid*, hlm. 93

Secara umum, pendidikan kita menghadapi banyak persoalan dan tantangan yang berat yang diakibatkan berkembangnya arus globalisasi yang terus mengepung keseharian kita, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Globalisasi, selain menyebabkan runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa, juga menghambat regenerasi kepemimpinan yang memiliki karakter religius dan nasionalis dalam pengabdianya terhadap nusa dan bangsa. Kepemimpinan yang berkarakter religius dan nasionalis diharapkan bisa menjadi landasan fundamental dalam mereduksi hal-hal yang negatif akibat efek globalisasi yang melanda hampir di semua sudut kehidupan kita.

Permasalahan umum pendidikan di Indonesia menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah sebagai berikut;⁷⁴

1) Krisis Moral

Merosotnya pendidikan moral dimungkinkan karena pengaruh globalisasi yang melahirkan kemajuan dari sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh globalisasi secara tidak langsung bisa menjadi sindrom menakutkan bagi karakter anak didik yang menurun drastis.

Di kalangan anak didik, pendidikan moral cenderung terabaikan, bahkan seringkali tidak menjadi titik tekan dalam setiap lembaga-lembaga pendidikan nasional. Persoalan ini muncul akibat kurangnya perhatian tenaga pendidik dan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari.

2) Krisis Spiritualitas

Permasalahan pendidikan Indonesia sesungguhnya berakar dari kurangnya penanaman pendidikan agama sejak dini oleh keluarga kepada anak-anak mereka. Pendidikan agama menyangkut konsistensi anak dalam menjalankan perilaku spiritual yang terkait dengan aktivitas membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, menghadiri peringatan hari keagamaan, dan lain sebagainya. Pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak ketika berinteraksi dengan orang lain, apalagi berkaitan dengan aktivitas keagamaan.

⁷⁴ Ngainun Naim, *Character Building*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 10-13

Di bidang pendidikan, kehidupan modern ini juga telah menimbulkan berbagai problem yang cukup akut. Misalnya, ketidaksinkronan antara tujuan pendidikan di sekolah dengan pola pikir sebagian masyarakat terdidik yang berkembang, terjadinya komersialisasi pendidikan, penurunan kecerdasan moral anak didik, hingga menyebabkan berkembangnya sikap hidup yang eksploratif-oportunistik bagi para siswa.

3) Krisis Keluhuran Budaya

Tantangan dunia pendidikan bukan hanya mengenai sistem pembelajaran atau kurikulum yang ditetapkan, melainkan menyangkut krisis keluhuran budaya yang sesuai dengan identitas kebangsaan. Krisis budaya barangkali tidak secara langsung berkaitan dengan potret buram pendidikan Indonesia, akan tetapi sangat berpengaruh besar terhadap cara berperilaku dan bertindak yang bertentangan dengan adat-istiadat maupun kebudayaan masyarakat setempat.

Pengaruh globalisasi bagi lunturnya nilai-nilai budaya bangsa merupakan bagian dari tantangan besar pendidikan untuk mematangkan pengetahuan tentang kearifan lokal yang tercipta dan termanifestasi dalam budaya bangsa. Dunia pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam konteks pengembangan pendidikan yang berkebudayaan. Ini karena, di institusi semacam ini berkumpul para tokoh kebudayaan yang memiliki perhatian pada pengembangan keseimbangan olah pikir dan rasa.

4) Krisis Keteladanan

Pendidikan Indonesia hanya berorientasi pada upaya mempercepat transmisi pengetahuan saja, akibatnya tujuan pembentukan karakter dan kepribadian anak didik terabaikan. Sekolah sebagai bagian dari lembaga pendidikan hanya mengejar prestasi dan tingkat kelulusan yang memuaskan saja, sementara aspek keteladanan terabaikan dalam proses pembelajaran.

Sekolah, selain tempat untuk menuntut ilmu, juga untuk menanamkan karakter pada anak didiknya. Krisis keteladanan dalam dunia pendidikan merupakan problem yang cukup serius dalam memkan bentuk

karakter anak didik. Tujuan yang sesungguhnya adalah bertujuan untuk memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan nilai-nilai moralitas dan agama sekalipun.

5) Krisis Orientasi Kebijakan

Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia seolah menjadi sesuatu yang lumrah dalam setiap wacana yang digulirkan pemerintah. Buktinya, hampir setiap ada pergantian menteri, terjadi pula pergantian kurikulum yang selalu memunculkan pro dan kontra di kalangan pemerhati pendidikan dan orang tua. Perubahan kurikulum tak lebih sebagai sebuah proyek untuk pengadaan buku-buku baru demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan implikasinya bagi dunia pendidikan kita.

Kurikulum merupakan gambaran kegiatan belajar dalam suatu lembaga pendidikan. Di dalam kurikulum tidak sekedar dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan ke anak didik oleh pendidiknya, tetapi juga segala kegiatan yang menyangkut kependidikan dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak didik dalam mencapai hakikat tujuan pendidikan yang sebenarnya, terutama perubahan tingkah laku yang menjadi cerminan dari kualitas anak didik yang berkepribadian luhur.

6) Krisis Psikologis

Krisis psikologis yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah semakin banyaknya generasi muda Indonesia yang mudah putus asa, bahkan berani melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Meskipun kemajuan pendidikan terus-menerus mewarnai perjalanan hidup manusia, tidak secara otomatis akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam mengarungi pahit getirnya kehidupan.

Berkembang pesatnya kemajuan teknologi disatu sisi mempermudah bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, di sisi lain menjadi beban terutama karena adanya sejumlah nilai-nilai ikutan dari teknologi yang membahayakan generasi muda, yakni nilai-nilai sekular, pragmatis, dan positivis. Akibatnya, banyak masyarakat yang telah mengalami krisis filosofi dalam kehidupannya,

mereka seakan lupa akan hakikat eksistensi kehidupan di dunia ini. Problem kehidupan modern ini juga telah merasuki dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat lainnya, tak terkecuali bidang politik, hukum, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Ngainun Naim, banyaknya persoalan adalah cerminan lemahnya karakter positif dalam dunia pendidikan kita. Implikasi dari lemahnya karakter positif dalam dunia pendidikan adalah banyaknya kasus yang terjadi di hampir semua lini kehidupan. Tawuran antar pelajar yang semakin hari semakin memprihatinkan, korupsi di kalangan birokrasi pendidikan, semakin banyaknya guru yang tidak bisa lagi menjadi teladan hingga mewabahnya demoralisasi pelajar.⁷⁵

Menurut A. Qodry A. Azizy, bahwa ada enam faktor yang menjadi titik lemah sistem pendidikan nasional, yaitu:

1. Pendidikan yang kaku dan sentralistik.
2. Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat.
3. Sistem birokrasi yang kaku dan tidak jarang sebagai kendaraan politik penguasa.
4. Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai alat birokrasi.
5. Pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, tetapi hanya berorientasi pada sisi kognitif peserta didik.
6. Anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu.⁷⁶

Abdul Rahman Shaleh, mengatakan ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu;⁷⁷

⁷⁵ Ngainun Naim, *Character Building*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 18-21

⁷⁶ A. Qodri A. Azizy, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 8-12

⁷⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 243

1. Strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan menghasilkan output yang bermutu pula. Ternyata strategi yang diperkenalkan sebagai *teori education production function* ini tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan
2. Pengelolaan pendidikan yang ada selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Implikasinya, kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan di bawah tidak dapat dipikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi yang ada di pusat.

Selain itu, problematika yang tidak kalah pentingnya yang ada di dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan. Parameter rendahnya mutu pendidikan kita adalah rendahnya mutu lulusan di hampir semua jenjang pendidikan formal. Indikatornya adalah Ujian Nasional (UNAS/UN) selalu menjadi momok bersama, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, kepala sekolah, birokrat pendidikan, hingga kepala daerah. Tidak lulus UNAS/UN tidak hanya kiamat bagi siswa, tetapi juga bagi semua pihak yang terkait. Berbagai upaya ditempuh agar semua siswa lulus, diantaranya contekan, membeli jawaban soal, dan lain sebagainya.⁷⁸

Implikasi dari semua problematika pendidikan di Indonesia seperti yang tersebut di atas adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di negeri sendiri. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di negeri sendiri, bisa dilihat semakin banyaknya minat pelajar maupun mahasiswa yang ingin belajar ataupun kuliah di luar negeri. Setiap dibuka lowongan belajar ataupun kuliah di luar negeri, baik melalui program beasiswa ataupun biaya mandiri, peminatnya semakin banyak dan membludak. Hal yang demikian ini merupakan indikator bahwa mereka lebih percaya pada sistem dan kualitas pendidikan luar negeri dibandingkan dalam negeri sendiri. Indikator lain adalah menurunnya minat pelajar maupun mahasiswa luar negeri untuk belajar maupun berkuliah di Indonesia. Pada era

tahun 80 sampai 90-an, banyak yang belajar dan berkuliah di berbagai sekolah ataupun perguruan tinggi, negeri atau swasta di Indonesia. Mungkin, hal yang menarik bagi mereka untuk belajar di Indonesia adalah mutu pendidikannya bagus serta sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing di kancah Internasional, terutama kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, pada saat ini banyak pelajar, mahasiswa, maupun dosen yang berasal dari Indonesia, memilih belajar dan mengajar di negara lain dari pada belajar dan mengajar di negerinya sendiri. Hal yang demikian merupakan indikator ketidakpercayaan anak negeri terhadap kualitas serta mutu pendidikan negeri sendiri.

Menurut Novan Ardy Wiyani dan Barnawi (2012: 78-79), tantangan dunia pendidikan kita saat ini adalah:

1. Proses pendidikan cenderung *cognitif oriented*.

Hal tersebut merupakan salah satu dari karakter masyarakat di era informasi dan komunikasi.

2. Munculnya persaingan antarsekolah dalam ranah materiil.

Sekolah membutuhkan berbagai fasilitas untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tiap sekolah pun berusaha untuk memenuhinya, bahkan terjadi persaingan antarsekolah dalam pemenuhannya yang menjadikan sekolah mengabaikan pembangunan karakter peserta didiknya.

3. Mengikisnya nilai-nilai agama pada peserta didik.

Transformasi pendidikan yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi cenderung *cognitif oriented* sehingga transformasi nilai pun terabaikan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menjadikan terkikisnya nilai-nilai agama pada peserta didik. Salah satunya contohnya adalah banyaknya macam alat teknologi canggih seperti hp, komputer, dan segala aplikasinya membuat pemakainya mengabaikan waktu shalat, mengaji, belajar, dan pekerjaannya.

Sikun Pribadi (1984) mengemukakan tiga golongan kesalahan dalam melaksanakan pendidikan:

- a. Kesalahan-kesalahan teknis, artinya kesalahan yang disebabkan oleh kekurangketerampilan atau salah dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip tertentu.
- b. Kesalahan-kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri.
- c. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya konseptual, artinya karena pendidikan kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat-akibat yang tak dapat dibenarkan.⁷⁹

D. Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pendidikan di Negeri Sendiri

Berbagai problematika yang menghiasi dan menimpa dunia pendidikan saat ini, tentulah sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat, utamanya orangtua yang menggantungkan masa depan hidupnya pada anaknya. Kecemasan tersebut, sangat bisa dimengerti dan dipahami karena anak adalah aset dan tumpuan masa depan orangtua. Pendidikan yang seharusnya bisa menghantarkan anak-anaknya ke masa depan yang baik dan cerah, justru menghadirkan kecemasan baru akan nasib hidupnya kelak. Dan kesemuanya itu bermuara pada persoalan dunia pendidikan yang tidak ada henti-hentinya mengalami banyak masalah.

Dunia pendidikan selalu mengalami pergeseran dan tantangan. Tantangan yang serius yang akan dihadapi dunia pendidikan kita adalah akibat dunia yang semakin mengglobal, bergerak dan berubah semakin cepat dan kompetitif. Dalam hal ini, pendidikan dan sekolah merupakan garda terdepan dalam menghadapi perubahan global tersebut.

Proses pendidikan di sekolah pada era teknologi informasi dan komunikasi ini harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dibalik majunya teknologi informasi dan komunikasi, kemajuannya tidak dapat menggantikan peran sekolah (dalam hal ini guru) dalam pendidikan. Secanggih apa pun

⁷⁹Modul Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, *Pedagogik*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), Cet. I, hlm. 28

teknologi saat ini, peserta didik masih tetap bergantung pada sosok guru sebagai pemandunya. Peran strategis sekolah sebagaimana tersebut diatas tadi, harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meminimalisasi efek negatif di era global beserta tantangan dan permasalahannya.

Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan kembali terhadap dunia pendidikan, maka sinergi dan integrasi antara pihak orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah harus ditingkatkan. Untuk mengatasi persoalan pendidikan beserta anak didiknya sebagai subjek pendidikan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat terutama orangtua, pihak sekolah, dan orang-orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Diharapkan dengan berpartisipasinya semua elemen bangsa tanpa terkecuali, dunia pendidikan Indonesia keluar dari segala problematikanya.

Untuk itu, ada beberapa hal yang setidaknya harus diperhatikan oleh orangtua dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Memilih sekolah yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.

Visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut diharapkan bisa mewujudkan harapan orangtua kepada anak setelah bersekolah di situ.

- b. Memilih sekolah yang biaya pendidikannya terjangkau.

Efisiensi biaya pendidikan yang dibutuhkan bagi anak dalam proses pendidikan di sekolah tentunya lebih murah karena pendidikan dilaksanakan secara klasikal-kolektif. Namun, kadang yang terjadi adalah sebaliknya, biaya pendidikan di sekolah menjadi sangat mahal. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya asumsi pada masyarakat bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mahal yang tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah.

Masyarakat harus jeli dalam menanggapi fenomena tersebut. Jangan sampai terjebak dan memaksakan diri untuk masuk di dalamnya jika memang tidak mampu untuk menyekolahkan di sekolah tersebut. Solusinya, masyarakat bisa memilih sekolah yang biaya pendidikannya terjangkau yang sudah terakreditasi. Sebab sekolah yang telah terakreditasi telah mendapat jaminan menjadi sekolah yang bermutu.

- c. Memilih sekolah yang mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai.

Pendidikan anak akan berjalan efektif apabila didukung dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal itu seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan bagi orangtua untuk memilih sekolah yang tepat untuk anaknya.

- d. Memilih sekolah yang memiliki lingkungan sesuai dengan budaya masyarakat. Sekolah pada dasarnya tumbuh dari nilai-nilai budaya masyarakat dan untuk menumbuhkembangkan budaya kepada anak didik agar mereka hidup sesuai dengan nilai budayanya. Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak walaupun sekolah hanya suatu lembaga yang bertanggungjawab atas pendidikan anak.

Di sekolah, anak mengalami perubahan dalam tingkah laku sosialnya setelah mereka masuk sekolah. Proses perubahan tingkah laku tersebut tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dengan demikian, akan lebih bijak jika orangtua memilih sekolah untuk anaknya yang memiliki lingkungan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

- e. Memilih sekolah yang memiliki guru yang berkualitas.

Pada proses pendidikan, peran pendidik sangatlah besar dan strategis sehingga corak dan kualitas pendidikan secara umum dapat diukur dengan melihat kualitas para pendidiknya. Pendidik yang memiliki kualifikasi tinggi dapat menciptakan dan mendesain materi pendidikan yang lebih dinamis dan konstruktif. Mereka juga akan mampu mengatasi kelemahan materi dan subjek didiknya dengan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan menciptakan strategi yang aktif dan dinamis.

Dengan adanya pendidik yang berkualitas tinggi, kompetensi lulusan (*output*) pendidikan akan dapat dijamin sehingga mereka mampu mengelola potensi diri dan mengembangkannya secara mandiri untuk menatap masa depan gemilang yang sehat dan prospektif. Sekolah yang dipilih orangtua pun hendaknya memiliki pendidik yang berkualitas untuk mewujudkan harapan-harapan mereka.

- f. Memilih sekolah yang mengharmonisasikan pendidikan umum dan agama.

Setiap terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan dekadensi moral di masyarakat, semua pihak akan segera menoleh pada sekolah dan seakan

menuduhnya tidak bisa mendidik anak bangsa. Akhirnya, tuduhan tersebut terfokus pada pendidik yang dianggap alpa dan tidak profesional dalam menjaga moralitas bangsa. Selain itu, tuduhan juga difokuskan pada materi pendidikan yang cenderung *cognitif oriented* sehingga pendidikan hanya dapat menghasilkan anak didik yang memiliki intelektualitas tinggi, tetapi miskin akan nilai-nilai moral.

Sekolah pun merespons fenomena tersebut dengan memasukkan dan mengharmonisasikan pendidikan umum dan pendidikan agama secara seimbang-seirama dengan harapan dapat mengatasi berbagai dekadensi moral yang terjadi di masyarakat, sehingga muncullah seperti SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu, SMA Islam Terpadu, dan lain sebagainya.

Sekolah yang mengharmonisasikan pendidikan umum dan pendidikan agama adalah sekolah yang layak dipilih oleh para orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang saleh dan salehah yang menjadi investasi bagi orangtua kelak, di dunia maupun akhirat.⁸⁰

Begitu *urgen*-nya pendidikan bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, serta untuk pembangunan bangsa dan negara, maka pemerintah haruslah mengupayakan beberapa hal dalam bidang pendidikan, yakni:

1. Meningkatkan usaha pemerataan pendidikan;
2. Meningkatkan mutu pendidikan, seperti peningkatan profesional guru, akreditasi sekolah, serta pengadaan berbagai fasilitas-fasilitas pendidikan;
3. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan di semua jenjang lembaga pendidikan.⁸¹

Bagi sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan yang dipercaya masyarakat, hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan minat masyarakat terhadap dunia pendidikan antara lain:

⁸⁰ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monoktomik-Holistik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, hlm. 82-86

⁸¹ *Ibid*, hlm. 30

Pertama, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah harus merubah paradigma lama yang memperlihatkan upaya pendidikan lebih cenderung pada *sentralistik*, kebijakan lebih bersifat *top down*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, dan pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, keamanan, serta teknologi perakitan, peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi nonsekolah kepada paradigma baru, yang mana orientasi pendidikan pada *disentralistik*, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat *holistik*, artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan kemanusiaan, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan pada terbentuknya masyarakat Indonesia berkualitas dan kritis.⁸²*Kedua*, sekolah mengadakan kerja sama antara sekolah dan keluarga. Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik, sekolah perlu mengadakan kerja sama yang erat dan harmonis antara sekolah dan keluarga atau orangtua. Dengan adanya kerja sama itu, orangtua akan mendapatkan: (a) Pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. (b) Mengetahui berbagai kesulitan yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. (c) Mengetahui tingkah laku anaknya selama di sekolah, seperti apakah anaknya rajin, malas, suka membolos, suka mengantuk, nakal, dan sebagainya. Sedangkan bagi guru, dengan adanya kerja sama tersebut guru akan mendapatkan: (a) Informasi-informasi dari orangtua tentang kehidupan dan sifat-sifat anaknya. Informasi-informasi tersebut sangat berguna bagi guru dalam memberikan pendidikan sebagai anak didiknya. (b) Bantuan-bantuan dari orangtua dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi anak

⁸² Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Aditia Yogyakarta, 2001), hlm. 5

didiknya disekolah.⁸³ *Ketiga*, sebagai lembaga sosial, sekolah hendaknya melaksanakan fungsi sosial sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi-fungsi sekolah sebagai lembaga sosial, yaitu: (1) Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan; (2) Sekolah berfungsi untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, dan (3) Sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁸⁴

Menurut Tirta Rahardja, bahwa sekolah secara bertahap dikembangkan menjadi suatu tempat pusat latihan (*training centre*) manusia Indonesia di masa depan. Dengan kata lain sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak kepada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan di sekolah hendaknya secara seimbang dan serasi menjawab aspek nilai spiritual keagamaan, kebudayaan, penguasaan pengetahuan, dan pendidikan keterampilan anak didik.⁸⁵

Dalam lingkungan keluarga yang mendidik anak adalah orangtua (ayah dan ibu), sedangkan di sekolah disebut guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, guru sebagai pengganti orangtua di sekolah harus memberi kemudahan dalam pembelajaran bagi semua anak didik, agar mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anak. Menurut Mulyana, seorang guru sebagai pengganti orangtua di sekolah, harus memposisikan diri sebagai berikut:

1. Orangtua yang penuh kasih sayang pada anak didiknya.

⁸³ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monoktomik-Holistik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, hlm. 72-73

⁸⁴ Bambang Robandi, *Pedagogik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 221

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 220

2. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para anak didiknya.
3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani anak didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.
4. Memberikan sumbangan fikiran kepada orangtua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
5. Memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab.
6. Membiasakan anak didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar.
7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar anak didik, orang lain, dan lingkungannya.
8. Mengembangkan kreativitas.
9. Menjadi pembantu ketika diperlukan.⁸⁶

Disamping itu, guru harus meningkatkan kualitas keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar guru merupakan salah satu jenis keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Dengan memiliki keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan sekolah.

Ada beberapa jenis keterampilan mengajar sebagaimana dikemukakan oleh Wingkel antara lain: (1) keterampilan memberikan penguatan, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan membuka dan menutup pelajaran.⁸⁷

Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang ketiga setelah lingkungan pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan sekolah. Masyarakat merupakan suatu entitas yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Walaupun demikian, masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat adalah sekelompok

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 223

⁸⁷ Hamzah Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) Cet, III, hlm. 168

warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Peran tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Ikut menyelenggarakan pendidikan non pemerintah (swasta)

Demokratisasi pendidikan yang sedang digalakkan di Indonesia harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

b) Membantu pengadaan tenaga pendidik.

Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 ayat 2)

c) Membantu pengadaan biaya, sarana, dan prasarana pendidikan.

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan masyarakat secara langsung telah membantu dalam pengadaan biaya, sarana, dan prasarana pendidikan.

d) Menyediakan lapangan kerja.

Lulusan sekolah (*output*) nantinya akan terjun ke masyarakat. Masyarakat merupakan penyedia sekaligus penyerap lapangan kerja. Jika lulusan sekolah (*output*) sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, masyarakat pun akan menerima mereka (*outcomes*).⁸⁸

Solusi lain untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan adalah mencoba paradigma baru pendidikan yang terus berkembang. Berbagai paradigma baru pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut.

⁸⁸ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, *Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monoktomik-Holistik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, hlm. 88-89

Pertama, dari segi visinya, paradigma baru pendidikan harus diarahkan pada upaya menyiapkan masa depan bangsa agar mampu berkompetensi di era global. Di dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 dinyatakan, bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. **Kedua**, dari segi misinya, paradigma baru pendidikan saat ini diarahkan pada upaya: 1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Ketiga**, dari segi tujuannya, paradigma baru pendidikan saat ini tidak lagi bertumpu pada pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif yang sebanyak-banyaknya, melainkan harus disertai dengan mengamalkannya (*to do*), menginternalisasikannya (*to be*), dan menggunakannya bagi kepentingan masyarakat (*to life together*). **Keempat**, dari segi kurikulum, paradigma baru pendidikan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum bukan hanya yang tertulis di atas kertas, melainkan seluruh aktivitas yang mempengaruhi terjadinya proses pembelajaran. **Kelima**, dari segi pendidik, paradigma baru pendidikan, melihat bahwa guru, dosen atau tenaga pendidik, bukan lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan hanya salah satunya saja. **Keenam**, dari peserta didik, paradigma baru pendidikan saat ini melihat peserta didik sebagai mitra dalam kegiatan belajar mengajar yang harus diperlakukan secara adil, manusiawi, egaliter, demokratis, dihormati hak-hak asasinya, dan seterusnya. **Ketujuh**, dari proses belajar mengajar, paradigma

baru pendidikan saat ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. **Kedelapan**, dari segi lingkungannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat bahwa lingkungan yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran bukan hanya terbatas pada yang ada di ruangan kelas, melainkan yang berada di lingkungan global yang lebih luas yang memungkinkan dapat diakses melalui bantuan teknologi informasi. **Kesembilan**, dari segi sarana prasarana, paradigma pendidikan saat ini melihat, bahwa sarana dan prasarana bukan yang ditentukan oleh status kepemilikannya, melainkan oleh kemungkinan menggunakannya. **Kesepuluh**, dari segi manajemen pengelolaannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat, bahwa kegiatan pendidikan harus dikelola dengan pendekatan manajemen bisnis yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang memuaskan pada pelanggan (*customer oriented*). **Kesebelas**, dari segi pendanaannya, paradigma baru pendidikan saat ini melihat, bahwa dana pendidikan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik harus sebanding dengan produk yang layanan diberikan kepada peserta didik.⁸⁹

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika dunia pendidikan di Indonesia sangat kompleks, sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkannya.
2. Implikasi kompleksitas problematika pendidikan di Indonesia membuat masyarakat menjadi pesimis.
3. Untuk memecahkan problematika pendidikan, harus ada sinergi antara pemerintah, akademisi, sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua.
4. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan nasional, maka diperlukan perubahan kebijakan yang signifikan

⁸⁹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 16-25

terhadap pelaksanaan pendidikan, diantaranya mencoba paradigma baru pendidikan yang terus berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Trianto, 2010. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif , Konsep Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, Cet. II
- Sunan Ampel, IAIN, 2010, *Modul Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, Pedagogik*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel ,Cet. I
- Sardiman, 2010, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Naim, Ngainun, 2012, *Character Building*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Azizy, Qodri, A. 2003, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu
- Shaleh, Abdul Rahman, 2004, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ardy Wiyani, Novan, dan Barnawi, 2012, *Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monoktomik-Holistik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. I
- Jalal, Fasli, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* , Yogyakarta: Aditia Yogyakarta
- Robandi, Bambang, 2007, , *Pedagogik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Uno, Hamzah, 2008, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet, III
- Nata, Abuddin, 2009, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana